

PENGUMUMAN
NOMOR: 2082/II/KP.15/10/2021

TENTANG

SELEKSI TERBUKA
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN 2021

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2021, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dalam jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

A. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang akan diisi melalui seleksi terbuka sebagai berikut:

JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA		
NO	NAMA JABATAN	ESELON
1.	Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan	I.a
2.	Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi	I.a
3.	Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah	I.a
4.	Inspektur Utama	I.a

Deskripsi jabatan lebih rinci sebagaimana tercantum pada **Lampiran A** pengumuman ini.

B. Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

B.1. Persyaratan Umum

Persyaratan bagi calon pelamar PNS Jabatan Pimpinan Tinggi Madya BRIN sebagai berikut:

- Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1) diutamakan Doktor (S3);
- Memiliki pangkat sekurang-kurangnya Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
- Sehat jasmani dan rohani dengan menyampaikan surat keterangan dokter;
- Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial

- Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- f. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 7 (tujuh) tahun;
 - g. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (jabatan struktural Eselon II), atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama, paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. Diutamakan telah lulus Diklatpim Tingkat II;
 - i. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - j. Usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pelantikan;
 - k. Telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan yang terakhir;
 - l. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) tahun terakhir.

Persyaratan bagi calon pelamar Non PNS Jabatan Pimpinan Tinggi Madya BRIN sebagai berikut:

- a. Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia;
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Master (S2) diutamakan Doktor (S3);
- c. Sehat jasmani dan rohani dengan menyampaikan surat keterangan dokter;
- d. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang dibutuhkan;
- e. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 10 (sepuluh) tahun di bidang teknis dan manajerial;
- f. Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
- g. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta
- h. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
- i. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
- j. Usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pelantikan;
- k. Telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan yang terakhir;
- l. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun terakhir bagi yang berstatus wajib lapor.

B.2. Persyaratan Khusus (sebagai bukti tambahan rekam jejak, tidak bersifat menggururkan)

1. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan

1	Mempunyai pengalaman dalam menyusun naskah akademis sebagai pendukung peraturan pemerintah/peraturan presiden dengan bukti berupa naskah akademik dan/atau Surat Keputusan tentang Panitia Antar-Kementerian Penyusun Rancangan Peraturan.
---	--

2	Mempunyai pengalaman dalam menyusun advokasi kebijakan lingkup nasional dengan bukti berupa dokumen advokasi kebijakan.
3	Mempunyai pengalaman dalam menyusun <i>logic model</i> perencanaan strategis dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang berupa SK/Peraturan/Dokumen Perencanaan Strategis Jangka Panjang dan <i>Logic Model</i> di lingkup makro/multi sektor.
4	Mampu memahami dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara lisan dan tertulis.

2. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi

1	Mempunyai pengalaman dalam menyusun kebijakan berupa naskah akademis/naskah urgensi sebagai bagian dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
2	Mempunyai pengalaman dalam advokasi kebijakan riset dan inovasi yang telah diimplementasikan
3	Mempunyai pengalaman dalam kegiatan pengukuran dan indikator riset, teknologi, dan inovasi
4	Mampu memahami dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara lisan dan tertulis.

3. Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah

1	Mempunyai pengalaman dalam menyusun naskah akademis sebagai pendukung peraturan pemerintah/peraturan presiden dengan bukti berupa naskah akademik dan/atau Surat Keputusan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusun Rancangan Peraturan.
2	Mempunyai pengalaman dalam melakukan pembinaan dan/atau menyusun advokasi kebijakan lingkup nasional/daerah dengan bukti berupa dokumen pembinaan dan/atau advokasi kebijakan riset dan inovasi daerah.
3	Mempunyai pengalaman dalam bidang <i>public-private partnership</i> dengan mitra nasional/daerah dengan bukti berupa dokumen kerjasama.
4	Mampu memahami dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara lisan dan tertulis.

4. Inspektur Utama

1	Mempunyai pengalaman dalam menyusun kebijakan teknis terkait pengawasan intern dalam lingkup riset dan inovasi.
2	Mempunyai pengalaman dalam pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya.
3	Mampu memahami dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara lisan dan tertulis.

C. Tata Cara Pendaftaran dan Kelengkapan Dokumen Lamaran

1. Pendaftaran dilakukan melalui alamat website: <https://selter.brin.go.id>
2. Dokumen kelengkapan dapat diunduh melalui: <https://selter.brin.go.id>
3. Lamaran ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Badan Riset dan Inovasi Nasional.

4. Scan lamaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- dan dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut:
 - a. Scan Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan format Lampiran B, yang ditandatangani oleh pelamar dan diketahui oleh Pejabat yang Berwenang pada instansi pelamar;
 - b. Scan fotocopy ijazah pendidikan yang disyaratkan dan dilegalisir/disahkan (PNS dan Non PNS);
 - c. Scan fotocopy SK Kepangkatan terakhir yang dilegalisir/disahkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang menyelenggarakan fungsi manajemen kepegawaian pada instansi yang bersangkutan (Bagi PNS);
 - d. Scan fotocopy SK pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir/disahkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang menyelenggarakan fungsi manajemen kepegawaian pada instansi yang bersangkutan (Bagi PNS);
 - e. Scan Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat II atau Tingkat III atau yang setara, bila ada;
 - f. Scan Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - h. Scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani hasil uji kesehatan dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - i. Scan Bukti penyerahan SPT Tahunan tahun terakhir;
 - j. Scan Bukti penyerahan LHKPN dan/atau LHKSN tahun terakhir;
 - k. Scan Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta (Non PNS);
 - l. Scan Surat pernyataan bahwa pelamar tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus atau anggota partai politik, yang bermeterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar (PNS dan Non PNS) dan diketahui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang menyelenggarakan fungsi manajemen kepegawaian pada instansi yang bersangkutan (PNS);
 - m. Scan Surat pernyataan bahwa pelamar tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan/atau perdata, serta hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, yang bermeterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar (PNS dan Non PNS), dan diketahui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang menyelenggarakan fungsi manajemen kepegawaian pada instansi yang bersangkutan;
 - n. Scan Surat pernyataan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang untuk mengikuti rangkaian seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BRIN.

- o. Scan Surat pernyataan bersedia mutasi ke lingkungan BRIN jika telah diterima sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Bagi peserta luar BRIN).
- 5. Lamaran beserta seluruh dokumen persyaratan administrasi sebagaimana angka 2 huruf a sampai dengan n, dimasukkan dalam aplikasi Seleksi Terbuka BRIN (<https://selter.brin.go.id>) dan sudah diterima oleh Panitia Seleksi JPT Madya paling lambat tanggal **17 November 2021 pukul 23:59 WIB**.
- 6. Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana angka 5 dapat diperbarui selama masa penerimaan berkas lamaran melalui aplikasi Seleksi Terbuka BRIN (<https://selter.brin.go.id>).
- 7. Lamaran yang diproses hanya lamaran beserta dokumen administrasi yang lengkap sesuai yang disyaratkan dan tidak diperkenankan mengganti atau menambah atau mengurangi dokumen yang telah diterima oleh Panitia Seleksi setelah penutupan pendaftaran.

D. Tahapan Seleksi dan Penjadwalan

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman	03 November 2021
2	Pendaftaran dan penerimaan berkas lamaran	03 November 2021 s.d. 17 November 2021
3	Seleksi Administrasi	03 November 2021 s.d 18 November 2021
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	19 November 2021
5	Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (Assessment Center)	23 November 2021*
6	Seleksi Penulisan Makalah	24 November 2021
7	Pengumuman Seleksi Kompetensi (Assessment Center) dan Seleksi Penulisan Makalah	08 Desember 2021
8	Seleksi presentasi dan wawancara	14 s.d. 15 Desember 2021
9	Penyampaian laporan hasil seleksi kepada Kepala BRIN	21 Desember 2021
10	Pengumuman hasil akhir seleksi	28 Desember 2021

*) Menunggu persetujuan dari BKN

E. Ketentuan Lainnya

1. Informasi terkait tata cara pendaftaran dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi di nomor 0812-1234-7390 (WA) pada jam kerja (07.30-16.00 WIB).
2. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya BRIN tidak memungut biaya dalam bentuk apapun untuk setiap tahapan seleksi;
3. Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BRIN ini tidak ada bimbingan seleksi atau persiapan pendahuluan;
4. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh peserta;
5. Seluruh keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;

6. Apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BRIN dapat digugurkan secara sepihak.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 29 Oktober 2021

Ketua Panitia Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya BRIN,



Nur Tri Aries Suestiningtyas, MA.
NIP 196804161994032001

Lampiran A Pengumuman

Nomor : 2082/II/KP.15/10/2021

Tanggal : 29 Oktober 2021

**Deskripsi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2021**

1. JPT Madya Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan

Ikhtisar Jabatan:

Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan ketenaganukliran dan keantariksaan sebagai landasan dalam pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan ketenaganukliran dan keantariksaan sebagai landasan dalam pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan ketenaganukliran dan keantariksaan;
- c. pengawasan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan ketenaganukliran dan keantariksaan;
- d. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan ketenaganukliran dan keantariksaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

2. JPT Madya Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi

Ikhtisar Jabatan:

Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan dengan berpedoman pada nilai Pancasila.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
- b. pelaksanaan integrasi, koordinasi, dan sinkronisasi program, anggaran, dan rencana kerja pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan dengan berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
- d. pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
- e. pelaksanaan pengukuran dan indikator riset dan inovasi;
- f. pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

3. JPT Madya Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Ikhtisar Jabatan:

Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dilaksanakan BRIDA.

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang memperkuat peran dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan di daerah di segala bidang kehidupan dengan berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- c. koordinasi penyusunan atas rencana induk dan peta jalan serta perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- e. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- f. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- g. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

4. JPT Madya Inspektur Utama

Ikhtisar Jabatan:

Inspektur utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BRIN

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan BRIN;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BRIN terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern di lingkungan BRIN; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Lampiran A Pengumuman

Nomor : 2082/II/KP.15/10/2021

Tanggal: 29 Oktober 2021

Yth.
Ketua Panitia Seleksi
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya BRIN
di
Jakarta

Sehubungan dengan pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian JPT Madya (Eselon I.a) di lingkungan BRIN Nomor 2082/II/KP.15/10/2021, tanggal 29 Oktober 2021, saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Satuan Kerja :

mengajukan diri untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya: *)

.....

mengajukan diri untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya: **)

.....

di lingkungan BRIN dan akan mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Sebagai kelengkapan pendaftaran, terlampir saya sampaikan seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan.

Demikian saya sampaikan, atas perhatian Ibu saya ucapkan terima kasih.

Jakarta,
Hormat saya,

Nama
NIP

Keterangan:

*) Pilihan pertama. Menjadi prioritas yang wajib diisi.

***) Pilihan kedua. Jika berminat, silahkan mengisi satu posisi jabatan. Jika tidak berminat maka kosongkan atau beri tanda (X).

Lampiran A Pengumuman

Nomor : 2082/II/KP.15/10/2021

Tanggal : 29 Oktober 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Satuan Kerja :

menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya **tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus atau anggota partai politik selama 5 (lima) tahun terakhir.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
JPT Pratama bidang kepegawaian
pada instansi pelamar

Jakarta,
Yang menyatakan,

Nama
NIP.

Nama Pelamar
NIP .

Lampiran A Pengumuman
Nomor : 2082/II/KP.15/10/2021
Tanggal : 29 Oktober 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Satuan Kerja :

menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya **tidak pernah/sedang dalam proses dijatuhi hukuman pidana dan/atau perdata** selama saya menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
JPT Pratama bidang kepegawaian
pada instansi pelamar

Jakarta,
Yang menyatakan,

Nama
NIP.

Nama Pelamar
NIP .

Lampiran A Pengumuman
Nomor : 2082/II/KP.15/10/2021
Tanggal : 29 Oktober 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Satuan Kerja :

menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya **tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat** selama saya menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
JPT Pratama bidang kepegawaian
pada instansi pelamar

Jakarta,
Yang menyatakan,

Nama
NIP.

Nama Pelamar
NIP .

Lampiran A Pengumuman

Nomor : 2082/II/KP.15/10/2021

Tanggal : 29 Oktober 2021

FORMULIR PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Satuan Kerja :

memberikan izin untuk mengajukan diri dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya: *)

.....
memberikan izin untuk mengajukan diri dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya: **)

.....
di lingkungan BRIN kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Satuan Kerja :

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Pejabat Pembina Kepegawaian /
Pejabat yang Berwenang pada instansi
pelamar

Nama
NIP.

Keterangan:

*) Pilihan pertama. Menjadi prioritas yang wajib diisi.

***) Pilihan kedua. Jika berminat, silahkan mengisi satu posisi jabatan. Jika tidak berminat maka kosongkan atau beri tanda (X).

Lampiran A Pengumuman

Nomor : 2082/II/KP.15/10/2021

Tanggal : 29 Oktober 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (DRH)

Pas foto

A. Keterangan Perorangan

1. NIP :
2. NAMA :
3. KARPEG :
4. PANGKAT/GOL.RUANG :
5. TANGGAL LAHIR :
6. TEMPAT LAHIR :
7. JENIS KELAMIN :
8. AGAMA :
9. STATUS PERKAWINAN :
10. ALAMAT :
11. KOTA/PROPINSI :
12. HOBI :
13. KODE POS :
14. TELEPON RUMAH :
15. NOMOR HANDPHONE :
16. EMAIL :

B. Pendidikan

1. Pendidikan di dalam dan di luar negeri					
NO.	LEVEL	NAMA SEKOLAH/ UNIVERSITAS	SERTIFIKAT	TGL.MASUK	TGL.LULUS
1	SD				
2	SLTP				
3	SLTA				
4	S-1				
5	S-2				
6	S-3				

2. Kursus/Pelatihan di dalam dan di luar negeri							
NO.	TRAINING	NO. SK	TGL. SK	SERTIFIKAT	TGL.MULAI	TGL.BERAKHIR	LOKASI
1							
2							
3							
4							

C. Ruang Riwayat Pekerjaan

1. Riwayat kepangkatan/golongan ruang penggajian				
NO	TMT	NOMOR SK	TANGGAL SK	PANGKAT/GOL.RUANG
1				
2				
3				
4				

5				
---	--	--	--	--

2. Riwayat Jabatan Struktural							
NO.	TMT	NO. SK	TGL. SK	NO. SK BERHENTI	TGL. BERHENTI	JABATAN	UNIT KERJA
1							
2							
3							
4							
5							

3. Riwayat Jabatan Fungsional									
NO.	TMT	NO. SK	TGL. SK	NO. PAK	TGL. PAK	JENIS	FUNGSIONAL	KREDIT POINT	KET
1									
2									
3									
4									
5									

4. Riwayat Penugasan							
NO.	JENIS TUGAS	DEPT.	MULAI	SAMPAI	NO. SK	TGL. SK	
1							
2							
3							

5. Riwayat Perpindahan						
NO.	TMT PINDAH	NO. SK	TGL. SK	DARI	KE	ALASAN
1						
2						
3						

D. Tanda Jasa/Kehormatan

NO.	PENGHARGAAN	NOMOR SK	TANGGAL SK	PEMBERI
1				
2				
3				
4				

E. Pengalaman Aktivitas Ilmiah

NO.	KEGIATAN	DESKRIPSI	MULAI	SELESAI	LOKASI	NEGARA	SPONSOR
1							
2							
3							
4							
5							

F. Riwayat Organisasi Profesi

NO.	NAMA ORGANISASI	POSISI	MULAI	SELESAI	LOKASI	NEGARA
1						

G. Karya Tulis Ilmiah

NO.	PENULIS	JUDUL	TAHUN	MEDIA	SKALA	KATEGORI
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

H. Keterangan Keluarga

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT/TGL.LAHIR	PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN	HUBUNGAN
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Jakarta,

(_____)
NIP.

Persyaratan Khusus JPT Madya
 (diisi sesuai dengan jabatan yang dilamar)

Catatan:

Persyaratan khusus ini merupakan unsur penilaian rekam jejak, dan tidak bersifat menggugurkan. Kolom nama kegiatan yang diisi dalam persyaratan khusus wajib dilengkapi bukti dalam bentuk PDF dan diunggah pada aplikasi Seleksi Terbuka (<https://selter.brin.go.id>).

1. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan

NO	PERSYARATAN KHUSUS	
I	Mempunyai pengalaman dalam menyusun naskah akademis sebagai pendukung peraturan pemerintah/peraturan presiden dengan bukti berupa naskah akademik dan Surat Keputusan tentang Panitia Antar-Kementerian Penyusun Rancangan Peraturan.	
	NAMA KEGIATAN (TAHUN)	PENJELASAN
	1	
	2	
	dst	
II	Mempunyai pengalaman dalam menyusun advokasi kebijakan lingkup nasional dengan bukti berupa dokumen advokasi kebijakan	
	NAMA KEGIATAN (TAHUN)	PENJELASAN
	1	
	2	
	dst	
III	Mempunyai pengalaman dalam menyusun logic model perencanaan strategis dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang berupa SK/Peraturan/Dokumen Perencanaan Strategis Jangka Panjang dan Logic Model di lingkup makro/multi sektor atau dokumen pendukung lainnya	
	NAMA KEGIATAN (TAHUN)	PENJELASAN
	1	
	2	
	dst	
IV	Mempunyai pengalaman dalam menyusun logic model perencanaan strategis dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang berupa SK/Peraturan/Dokumen Perencanaan Strategis Jangka Panjang dan Logic Model di lingkup makro/multi sektor atau dokumen pendukung lainnya.	
	NAMA KEGIATAN (TAHUN)	PENJELASAN
	1	
	2	
	dst	
V	Mampu memahami dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara lisan dan tertulis	

	NAMA KEGIATAN (TAHUN)	PENJELASAN
1		
2		
dst		
	Sampaikan dalam bentuk narasi dan bukti dukung lainnya, terhadap rekam jejak lain terkait dengan persyaratan khusus Jabatan Deputy Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN.	

2. Deputy Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi

NO	PERSYARATAN KHUSUS	
I	Mempunyai pengalaman dalam menyusun kebijakan berupa naskah akademis/naskah urgensi sebagai bagian dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.	
	NAMA KEGIATAN (TAHUN)	PENJELASAN
1		
2		
dst		
II	Mempunyai pengalaman dalam advokasi kebijakan yang telah diimplementasikan	
	NAMA KEGIATAN (TAHUN)	PENJELASAN
1		
2		
dst		
III	Mempunyai pengalaman dalam penyusunan MoU	
	NAMA KEGIATAN (TAHUN)	PENJELASAN
1		
2		
dst		
IV	Mempunyai pengalaman dalam kegiatan pengukuran dan indikator riset, teknologi, dan inovasi.	
	NAMA KEGIATAN (TAHUN)	PENJELASAN
1		
2		
dst		
	Sampaikan dalam bentuk narasi dan bukti dukung lainnya, terhadap rekam jejak lain terkait dengan persyaratan khusus Jabatan Deputy Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN.	

3. Deputy Bidang Riset dan Inovasi Daerah

NO	PERSYARATAN KHUSUS	
I	Mempunyai pengalaman dalam menyusun naskah akademis sebagai pendukung	

	peraturan pemerintah/peraturan presiden dengan bukti berupa naskah akademik dan Surat Keputusan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusun Rancangan Peraturan.	
	NAMA KEGIATAN (TAHUN)	PENJELASAN
1		
2		
dst		
II	Mempunyai pengalaman dalam menyusun advokasi kebijakan lingkup nasional dengan bukti berupa dokumen advokasi kebijakan.	
	NAMA KEGIATAN (TAHUN)	PENJELASAN
1		
2		
dst		
III	Mempunyai pengalaman dalam bidang public-private partnership dengan mitra nasional/daerah dengan bukti berupa dokumen kerjasama.	
	NAMA KEGIATAN (TAHUN)	PENJELASAN
1		
2		
dst		
IV	Mempunyai pengalaman dalam membuat program fasilitasi, diseminasi dan pemanfaatan riset dan inovasi (daerah) berupa dokumen program fasilitasi serta laporan diseminasi dan pemanfaatan riset dan inovasi (daerah)	
	NAMA KEGIATAN (TAHUN)	PENJELASAN
1		
2		
dst		
V	Mampu memahami dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara lisan dan tertulis.	
	NAMA KEGIATAN (TAHUN)	PENJELASAN
1		
2		
dst		
	Sampaikan dalam bentuk narasi dan bukti dukung lainnya, terhadap rekam jejak lain terkait dengan persyaratan khusus Jabatan Deputy Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN.	

4. Inspektur Utama

NO	PERSYARATAN KHUSUS	
I	Mempunyai pengalaman dalam menyusun kebijakan teknis terkait pengawasan intern dalam lingkup riset dan inovasi.	
	NAMA KEGIATAN (TAHUN)	PENJELASAN
1		
2		

dst		
II	Mempunyai pengalaman dalam pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya.	
	NAMA KEGIATAN (TAHUN)	PENJELASAN
1		
2		
dst		
III	Mampu memahami dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara lisan dan tertulis.	
	NAMA KEGIATAN (TAHUN)	PENJELASAN
1		
2		
dst		
	Sampaikan dalam bentuk narasi dan bukti dukung lainnya, terhadap rekam jejak lain terkait dengan persyaratan khusus Jabatan Inspektur Utama BRIN.	

...., ... 2021

(Nama Lengkap)

NIP.

Lampiran A Pengumuman

Nomor : 2082/II/KP.15/10/2021

Tanggal : 29 Oktober 2021

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MUTASI ANTAR INSTANSI***

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Instansi :
Unit Kerja :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Satuan Kerja :

menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya bersedia untuk mutasi dari instansi asal saya saat ini ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
JPT Pratama bidang kepegawaian
pada instansi pelamar

.....
Yang menyatakan,

Nama
NIP.

Nama Pelamar
NIP .

Lampiran A Pengumuman
Nomor : 2082/II/KP.15/10/2021
Tanggal : 29 Oktober 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK/NIP :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya **tidak pernah/sedang dalam proses diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta** selama saya bekerja.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang menyatakan,

Nama Pelamar
NIK/NIP.